



**PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN PETANAHAAN
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN PETANAHAAN
Jalan Soka KM 13 Petanahan Telp. (0287) 6655369
TAHUN 2025**



BUPATI KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR 32 TAHUN 2025

TENTANG

PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjadi pedoman perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa sesuai hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kinerja dan pencapaian Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen, telah dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGESAHAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025.**

Pasal 1

- (1) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 merupakan pedoman untuk menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan Tahun Anggaran 2025.
- (2) Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Pelaksanaan lebih lanjut dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercermin dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Tahun 2025 dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kebumen lainnya dengan mengantisipasi kemungkinan perubahan kebijakan Pemerintah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI KEBUMEN,

ttd.

LILIS NURYANI

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 26 Juni 2025

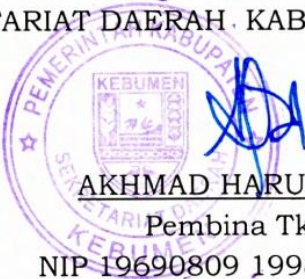
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

ttd.

EDI RIAN TO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2025 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN,



AKHMAD HARUN, S.H.
Pembina Tk. I
NIP 19690809 199803 1 006

PENUTUP

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) untuk periode 1 (satu) tahun. Sasaran program dan kegiatan Pembangunan di dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 telah diselaraskan dengan sasaran yang tercantum dalam dokumen Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah 2024-2026, sehingga turut berkontribusi terhadap capaian sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025 disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pembangunan, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, serta perkembangan kebijakan nasional, provinsi, dan daerah. Dokumen ini menjadi pedoman operasional tahunan bagi perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi, sekaligus sebagai instrumen untuk mewujudkan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD

Penyusunan Perubahan Renja didasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Penyusunan Rancangan;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir; dan
6. Penetapan.

Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025.



KATA PENGANTAR

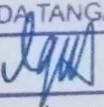
Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Petanahan Tahun 2025 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Dokumen perubahan Renja ini disusun sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika pelaksanaan pembangunan di tahun berjalan, baik karena adanya perubahan kebijakan, kondisi keuangan daerah, maupun karena perkembangan situasi dan kebutuhan masyarakat yang mendesak untuk ditangani secara cepat dan tepat. Proses perubahan ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tetap mempertahankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.

Perubahan Renja Kecamatan Petanahan Tahun 2025 ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan pemerintah tetap relevan, efisien, dan mampu menjawab tantangan pembangunan secara tepat sasaran. Dalam penyusunannya, telah dilakukan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah terkait, pemerintah desa, serta tokoh masyarakat.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Besar harapan kami, dokumen perubahan Renja ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat dalam pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Petanahan selama Tahun 2025.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kecamatan Petanahan.

DIVERIFIKASI OLEH TIM BAPPERIDA	
NAMA	TANDA TANGAN
Agus Setyawan	
Calyo Riyadi	



Petanahan, 26 Juni 2025
CAMAT, PETANAHAN
ARIS YUNANTO, S.IP. M.Si
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP : 19690927 198911 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Landasan Hukum	7
1.3 Maksud dan Tujuan.....	9
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II HASIL EVALUASI RENJA RENJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN 2023	13
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun	
2024 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	13
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	32
2.3 Isu–isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat	
Daerah	37
2.4 Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah	45
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	57
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH.....	59
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	59
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah.....	60
3.3 Program dan Kegiatan.....	61
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas	
Kabupaten.....	73
4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	74
BAB V PENUTUP.....	81
LAMPIRAN – LAMPIRAN:	
Lampiran 1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah (P1) Tahun	
Anggaran 2025 Kecamatan Petanahan	
Lampiran 2 Terdiri dari:	
- Berita Acara Musrenbangcam Tahun 2023 dan Lampiran	
- Dokumentasi Pelaksanaan Musrenbangcam Tahun 2023	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kecamatan Petanahan dan Pencapaian Renstra Kecamatan Petanahan Kab. Kebumen s.d Tahun	14
Tabel 2.2	Realisasi Anggaran Tahun 2025 Triwulan II.....	26
Tabel 2.3	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kecamatan Petanahan dan Pencapaian Renstra Kecamatan Petanahan Kab. Kebumen s.d Tahun 2024.....	37
Tabel 2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kec. Petanahan	47
Tabel 3.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Urusan Renja Kecamatan Petanahan Tahun 2025	61
Tabel 3.2	Program dan Kegiatan / Sub Kegiatan	65
Tabel 4.1	Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Kabupaten Kebumen	73
Tabel 4.2	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kab. Kebumen Provinsi Jawa Tengah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	75

BAB I

PENDAHULUAN

2.1 Latar Belakang

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 dalam Ketentuan Umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Pancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun berupa dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran

Sesuai dengan Pasal 175 Ayat (1) dalam Permendagri 86 tahun 2017 Renja PD disusun berdasarkan:

- a. Pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpatu;
- b. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
- c. Urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggung jawab PD.

Tata cara penyusunan Renja sebagaimana Pemendagri 86/2017 adalah sebagai berikut :

a. Persiapan Penyusunan Renja

- 1) Pembentukan Tim Penyusunan Renja PD
- 2) Orientasi mengenai Renja
- 3) Penyusunan Agenda Kerja Tim Penyusunan Renja PD
- 4) Penyiapan Data dan Informasi

b. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD

Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja pada Minggu pertama bulan Desember yang berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

c. Penyusunan Rancangan Renja PD

- 1) Penyusunan Rancangan Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja PD setelah dilakukan review

oleh Tim RKPD.

- 2) Rancangan Renja PD dibahas dan disempurnakan dalam forum PD/lintas PD
 - 3) Rancangan Renja PD disampaikan kepada kepala Bapperida untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKP menjadi rancangan RKPD. Rancangan Renja PD disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret.
- d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah
- Rancangan Renja Perangkat Daerah dibahas dan disempurnakan dalam forum perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
- Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bapperida. Forum tersebut dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Rancangan Renja Perangkat Daerah.
- e. Perumusan Rancangan Akhir Renja PD
- Perumusan rancangan akhir Renja PD merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja PD menjadi rancangan akhir Renja PD berdasarkan Perwali tentang RKPD.
- f. Penetapan Renja PD

Keterkaitan antara Renja dengan dokumen RKPD dan Renstra-PD terbangun secara logis dan fungsional yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi yang besar bagi pencapaian tujuan pembangunan.

Hubungan antar dokumen perencanaan mulai dari RKPD, Renstra-Perangkat Daerah dan Renja-Perangkat Daerah dengan dokumen anggaran adalah dokumen perencanaan bermuara pada penganggaran (RAPBD/APBD) yang melalui beberapa tahapan kebijakan keuangan yang perlu dirumuskan bersama baik antara pemerintahan dan masyarakat maupun antara pemerintahan dan legislatif yaitu Kebijakan Umum APBD (KUA) dan penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025, Renja SKPD digunakan sebagai dasar masukan dalam perencanaan periode satu tahun. RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 disusun sebagai dokumen perencanaan tahun ketiga dari periode Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 dengan visi Kabupaten Kebumen yaitu: “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”.

Renja Kecamatan Petanahan tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan tahunan merupakan penjabaran dari dokumen perencanaan lima tahunan yaitu Renstra Kecamatan Petanahan tahun 2021-2026, sehingga target capaian sasaran, indikator, program dan kegiatan yang akan dicapai dalam dokumen Renja Kecamatan Petanahan tahun 2025 harus selaras/konsisten dengan target capaian yang terdapat dalam Renstra Kecamatan Petanahan tahun 2021-2026.

Dokumen Renja Perubahan Kecamatan Petanahan tahun 2025 ini merupakan satu kesatuan dokumen perencanaan yang saling berkaitan antar satu dengan yang lainnya.

2.2 Landasan Hukum

Rencana Kerja Kecamatan Petanahan disusun berdasarkan regulasi (peraturan perundang-undangan yang berlaku) guna menjamin kepastian hukum perencanaan maupun pelaksanaannya. Berikut ini merupakan landasan hukum penyusunan Renja Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen tahun 2025:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 93) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 188) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 127) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 211);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 170);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 182);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kebumen Tahun

2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 210);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 219);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2025–2029;
13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan; dan
14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Pengesahan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen Tahun 2025;

2.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Petanahan Tahun 2025 ini adalah untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan pembangunan tahunan yang tertuang dalam RKPD Kabupaten Kebumen Tahun 2025 serta untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi dengan perencanaan pembangunan yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Petanahan Tahun 2021-2026 sebagai dokumen perencanaan Jangka Menengah (lima tahun).

Adapun tujuan dari penyusunan Renja Perubahan Kecamatan Petanahan Tahun 2025 ini adalah sebagai pedoman penyusunan dokumen Rencana Kerja (RKA)/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Petanahan Tahun 2025 sekaligus untuk mengevaluasi pencapaian program dan kegiatan di Kecamatan Petanahan Tahun sebelumnya (2024).

2.4 Sistematika Penyusunan

Sistematika penulisan Renja Perubahan Kecamatan Petanahan Tahun 2025 disusun sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang:

- A. Latar Belakang (SOTK Perangkat Daerah dan Tupoksi), mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses Penyusunan Renja Perangkat Daerah keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tindak lanjut dengan proses Penyusunan Rancangan APBD.
- B. Landasan Hukum, memuat Penjelasan tentang Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, Kewenangan Perangkat Daerah serta Pedoman yang dijadikan acuan dalam Penyusunan Perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- C. Maksud dan Tujuan, memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- D. Sistematika Penulisan, menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu. Bab ini menguraikan tentang:

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu (2024) dan Capaian Renstra Perangkat Daerah memuat kajian/ review terhadap Hasil Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu/ 2023. Perkiraan capaian tahun berjalan/ 2024, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.
- B. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan Indikator Kinerja dan Capaian Kinerja urusan yang diampu oleh Perangkat Daerah.
- C. Isu-Isu Penting dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan Pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas

dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah, dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

- D. Review Usulan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah, berisikan uraian mengenai perbandingan antara rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan hasil analisis kebutuhan/ penetapan RKPD.
- E. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat, diuraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah (diambil dari hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Petanahan).

Bab III. Tujuan dan Sasaran Kecamatan Petanahan

Bab ini menguraikan tentang:

- A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- B. Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Petanahan, perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.
- C. Program dan Kegiatan, Program Kegiatan berisikan penjelasan mengenai factor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan, penjelasan jika rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal Renja.

Bab IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Petanahan

- A. Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Kabupaten

- B. Rumusan Rencana Program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2025 serta perkiraan maju 2026 Perangkat Daerah selanjutnya disajikan pada lampiran Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Petanahan

Bab V. Penutup

Berisi uraian tentang:

- A. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun terkait ketersediaan anggaran.
- B. Kaidah-kaidah Pelaksanaan
- C. Rencana Tindak Lanjut

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN PETANAHAN TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Renja Perubahan Kecamatan Petanahan tahun 2025 disusun berdasarkan analisis kondisi objektif permasalahan maupun capaian/keberhasilan yang diraih. Dari permasalahan dan keberhasilan tersebut kemudian disusunlah suatu program, kegiatan dan sub kegiatan. Gambaran permasalahan dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang masih harus dihadapi Kecamatan Petanahan saat sekarang dan perkiraan keadaan yang akan datang. Sedangkan capaian keberhasilan dapat memberikan dorongan dan panduan untuk bagaimana tetap mempertahankan bahkan meningkatkan capaian yang telah diraih.

Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026, Kecamatan Petanahan mendukung salah satu prioritas pembangunan daerah yakni misi kesatu "Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsive serta penerapan *e-gov* dan *open gov* terintegrasi". Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Petanahan pada tahun 2025 menjalankan 4 Program dan 9 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan.

Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Petanahan Tahun 2023 dan pencapaian Renstra Kecamatan Petanahan 2021-2026 sampai Tahun 2023 disajikan pada Tabel 2.1 dibawah ini:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kecamatan Petanahan dan
Pencapaian Renstra Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Petanahan

Kode							Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Kecamatan Petanahan) s/d Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Peragkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan	
											Target Renja Tahun 2023	Realisasi Renja Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1							2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=5+7+9	11=(10/4)
							Urusan Wajib Pelayanan Dasar									
7	01	01					Kec.Petanahan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/ Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%
7	01	01					Perencanaan, Panganggaran dan Evaluasi	Jumlah Dokumen Perencanaan	51	10	10	10	100%	10	30	58

			2	01			Kinerja Perangkat Daerah	dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
7	01	01	2	01	01		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	26	5	5	5	100%	5	15	58,82	
7	01	01	2	01	07		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25	5	5	5	100%	5	15	60	
7	01	01	2	02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60	12	12	12	100%	12	36	60	
7	01	01	2	02	01		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85	17	17	17	100%	17	51	60	
7	01	01	2	02	03		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen Penatausahaan dan pengujian/ Verifikasi Keuangan	20	4	4	4	100 %	4	12	60	

								SKPD.								
7	01	01	2	06			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	60	12	12	12	100%	12	36	60
7.	01	01	2	06	01		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket Komponen Instalasi Listrik/ penerangan bangunan Kantor yang disediakan	20	12	12	12	100 %	12	36	180
7	01	01	2	06	04		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan.	60	12	12	12	100 %	12	36	60
7	01	01	2	06	05		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	60	12	12	12	100 %	12	36	60
7	01	01	2	06	06		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang	60	12	12	12	100 %	12	36	60

								disediakan								
7	0 1	0 1	2	06	07		Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan Material yang disediakan	60	12	12	12	100 %	12	36	60
7	0 1	0 1	2	06	09		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan penyelenggaraan rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD.	60	12	12	12	100 %	12	36	60
7	0 1	0 1	2	06	10		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD.	60	12	12	12	100 %	12	36	60
7	0 1	0 1	2	07			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	40	4	4	4	100%	4	12	30
7	0 1	0 1	2	07	05		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang disediakan	23	2	2	2	100%	0	6	26
7	0 1	0 1	2	07	06		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	10	2	2	2	100 %	2	6	0.6
7	0	0	2	07	02		Pengadaan	Jumlah unit	8	2	2	2	100%	2	6	75

	1	1					Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Pembangunan lainnya	sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan								
	01	01	2	08			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan jasa Penunjang urusan pemerintahan Daerah	12	12	12	12	100%	12	36	30
7	01	01	2	08	01		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan penyediaan jasa surat menyurat	60	12	12	12	100 %	12	36	60
7	01	01	2	08	01	02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	60	12	12	12	100%	12	36	60
7	01	01	2	08	04		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum kantor yang disediakan	60	12	12	12	100 %	12	36	60

7	0 1	0 1	2	09			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	161	16	16	16	100%	16	48	29
7	0 1	0 1	2	09	02		Penyediaan Jasa Pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perijinan kendaraan dinas operasional/ lapangan	Jumlah kendaraan dinas/ operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya.	34	6	6	6	100 %	6	18	52
7	0 1	0 1	2	09	05		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	75	4	4	4	100 %	0	12	16
7	0 1	0 1	2	09	06		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	42	8	8	8	100 %	6	24	57
7	0 1	0 1	2	09	09		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara /direhabilitasi	10	3	3	3	100 %	2	9	90

7							Kewilayahan										
7	0 1						Kecamatan										
7	0 1	0 2					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.	Prosentase cakupan Penyelenggara n Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	100	100	100	100%	100	100	100	100
7	0 1	0 2	2	04			Kegiatan: Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.	Presentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100	100	100	100	100%	100	100	100	100
							Sub Kegiatan:										
7	0 1	0 1	2	04			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Peririzan.	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non perizinan pada urusan Pemerintahan	45	9	9	9	100 %	9	27	60	
7	0 1	0 2	2	04	00 03		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan lain dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang dilimpahkan		0	0	0	100%		21	7	

7	0 1	0 5					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum	100	100	100	100	100%	100	100	100
7	0 1	0 5	2	01			Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	10	2	2	2	100	2	6	60
7	0 1	0 5	2	01			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka memantapkan Pengamalan Pancasila Pelaksanaan Undang Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan RI,	10	2	2	2	100 %	2	6	60

							Indonesia	Kegiatan dalam rangka HUT RI, (Hari Jadi Karnaval, Resepsi HUT RI.								
7	0 1	0 6					Program: Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100	100	100	100	100%	100	100	100
7	0 1	0 6	2	01			Kegiatan: Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	158	25	25	25	100%	25	75	47
7	0 1	0 6	2	01	03		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan Pendayagunaan Aset desa	73	21	21	21	100 %	21	63	86
7	0 1	0 6	2	01	08		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka	10	2	2	2	100 %	2	6	60

								Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.								
7	0 1	0 6	2	01	09		Fasilitasi, Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen, Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Profil dan IPMD)	10	2	2	2	100 %	2	6	60
7	0 1	0 6	2	01	11		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	10	2	2	2	100 %	2	6	60
7	0 1	0 6	2	01	13		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Musrenbangdes dan Musrenbang Cam)	10	2	2	2	100 %	2	6	60

7	0 1	0 6	2	01	16		Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PKK, UKS, BUMDES, Sosial Masyarakat)	20	4	4	4	100	4	12	60
7	0 1	0 6	2	01	17		Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah laporan hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya. (Penanggula ngan Kemiskinan (TKP2KDes dan Bansos Sembako)	10	2	2	2	100	2	6	6

Tabel 2.1 menunjukkan capaian kinerja Renstra 2021-2026 yang cukup baik dengan rata-rata 60,97%. Capaian yang masih cukup rendah pada Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, yaitu sebesar 30%, dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 29%.

Selanjutnya, Renja Kecamatan Petanahan tahun 2025 sampai dengan triwulan II dievaluasi sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang menyatakan bahwa setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya.

Evaluasi terhadap Renja Kecamatan Petanahan Tahun 2025 Triwulan II disusun berdasarkan hambatan, permasalahan yang timbul selama kegiatan berlangsung dan capaian atau keberhasilan yang dicapai dengan penilaian secara objektif, dari permasalahan, hambatan dan keberhasilan akan diperoleh suatu gambaran tentang program atau kegiatan yang dilaksanakan. Hambatan adalah suatu hal yang dapat menghalangi terlaksananya suatu program. Pada dasarnya terdapat dua kemungkinan munculnya hambatan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Masalah adalah sesuatu yang dibutuhkan penyelesaian karena terdapat ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi. Keberhasilan suatu keadaan dimana seseorang mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan ketiga kondisi tersebut kita bisa mengevaluasi program atau kegiatan kemudian disusunlah suatu program dan kegiatan. Gambaran permasalahan dimaksudkan untuk mendapatkan pemahaman besarnya tantangan yang masih harus dihadapi Kecamatan Petanahan saat sekarang dan perkiraan keadaan yang akan datang. Sedangkan capaian keberhasilan dapat memberikan dorongan dan panduan untuk bagaimana tetap mempertahankan bahkan meningkatkan capaian yang telah diraih.

Pada Tahun 2025, Kecamatan Petanahan menjalankan 4 Program, 9 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan dengan anggaran awal yang disediakan sebesar Rp3.728.492.500,00 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Realisasi Anggaran Tahun 2025 Triwulan II Kecamatan Petanahan disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Realisasi dan Anggaran Tahun 2025 Triwulan II

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase Capaian (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Darah Kabupaten/Kota			
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp5.628.300,00	Rp2.562.200,00	45,52%
Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp3.600.000,00	Rp870.000,00	24,17%
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp2.270.606.000,00	Rp497.846.700,00	21,93%
Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp13.267.400,00	Rp6.027.877,00	45,43%
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Rp2.000.000,00	Rp1.630.500,00	81,53%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp13.284.900,00	Rp5.200.000,00	39,14%
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp7.200.000,00	Rp3.085.500,00	42,85%
Sub Kegiatan Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Rp2.000.000,00	Rp1.315.000,00	65,75%
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material	Rp12.600.000,00	Rp5.313.000,00	42,17%
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp3.780.000,00	Rp740.000,00	19,58%
Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp1.530.000,00	Rp778.500,00	50,88%
Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Rp750.000,00	Rp725.000,00	96,67%
Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Rp15.000.000,00	Rp14.590.000,00	97,27%
Sub Kegiatan Pengadaan	Rp20.000.000,00	Rp15.649.000,00	78,25%

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase Capaian (%)
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp400.000,00	Rp220.000,00	55,00%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp27.000.000,00	Rp14.655.601,00	54,28%
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp10.016.600,00	Rp2.710.500,00	27,06%
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp46.000.000,00	Rp23.995.542,00	52,16%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Mebel	Rp1.250.000,00	Rp588.000,00	47,04%
Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp2.000.000,00	Rp1.250.000,00	62,50%
Sub Kegiatan Pemeliharaan /rehabilitasi gedung Kantor dan bangunan lainnya	Rp10.000.000,00	Rp3.931.500,00	39,32%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			
Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			
Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Rp37.014.500,00	Rp17.456.250,00	47,16%
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Rp1.081.393.800,00	0	0%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			
Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			
Sub Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan	Rp19.002.800,00	0	0%

Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi Anggaran	Prosentase Capaian (%)
Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Republik Indonesia			
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			
<i>Kegiatan Fasilitas, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>			
Sub Kegiatan Fasilitas, Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Rp28.455.800,00	Rp12.383.500,00	43,52%
Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Rp5.200.000,00	0	0%
Sub Kegiatan Fasilitas Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Rp16.680.000,00	Rp6.917.800,00	41,47%
Sub Kegiatan Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp9.060.000,00	Rp540.000,00	5,96%
Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Rp21.769.000,00	Rp1.800.000,00	8,27%
Sub Kegiatan Fasilitas Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp33.313.600,00	Rp13.036.000,00	39,13%
Sub Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Rp8.689.800,00	Rp3.600.000,00	41,43%
Jumlah	Rp3.728.492.500,00	Rp1.540.683.600,00	31,20%

Berdasarkan tabel – tabel diatas:

1. Pagu Anggaran secara keseluruhan Rp3.728.492.500,00 (Tiga Miliar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp1.163.333.641,00 (Satu Miliar Seratus Enam Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga ribu Enam Ratus Empat Puluh Satu Rupiah) dengan presentase 31,20%;

2. Analisis Per Program dan Kegiatan

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- 1) Capaian realisasi rata-rata: sekitar 46,7%, menunjukkan tingkat pelaksanaan yang sedang.
- 2) Beberapa sub kegiatan menunjukkan kinerja tinggi, namun sebagian lainnya masih rendah dengan rincian sebagai berikut:
 - Sub Kegiatan dengan capaian tinggi:
 - Pengadaan Mebel (96,67%)
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya (97,27%)
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik (81,53%)
Menunjukkan bahwa kegiatan pengadaan fisik relatif cepat terealisasi.
 - Sub Kegiatan dengan capaian rendah:
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi (19,58%)
 - Gaji dan Tunjangan ASN (21,93%)
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (24,17%)
Hal ini bisa disebabkan oleh jadwal pelaksanaan kegiatan yang masih berlangsung atau proses administrasi yang belum selesai.

B. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Terdapat dua sub kegiatan yaitu:

- 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Non Perizinan: capaian 47,16%.
- 2) Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan: 0%, belum terealisasi sama sekali.

Realisasi yang belum ada bisa mengindikasikan kegiatan belum dilaksanakan atau masih menunggu petunjuk teknis/pelaksanaan.

C. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

- 1) Sub kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional belum terealisasi karena dilaksanakan di Bulan Agustus

D. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

- 1) Sub kegiatan dengan capaian tertinggi:
 - Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa (43,52%)
 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Desa (41,47%)
 - Koordinasi Pendampingan Desa (41,43%)

2) Sub kegiatan dengan capaian sangat rendah:

- Fasilitasi Ketenteraman dan Ketertiban (5,96%)
- Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Partisipatif (8,27%)

Fasilitasi Pilkades (0%) Kegiatan ini belum dilaksanakan karena bergantung pada jadwal pelaksanaan di desa atau menunggu regulasi teknis.

3. Analisis Deviasi dan Pola Pelaksanaan

- 1) Kegiatan pengadaan barang dan jasa cenderung tinggi realisasinya (di atas 70%), karena pengadaan biasanya dilakukan lebih awal.
- 2) Kegiatan fasilitasi, pembinaan, dan rapat koordinasi justru rendah realisasinya, umumnya dilaksanakan menjelang pertengahan hingga akhir tahun anggaran.
- 3) Deviasi terbesar terlihat pada kegiatan yang masih 0%, terutama:
 - o Pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan.
 - o Pembinaan wawasan kebangsaan.
 - o Pelaksanaan Pilkades.

Hambatan dan Permasalahan yang dihadapi secara umum dalam pencapaian target anggaran yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2025 sampai dengan triwulan II antara lain :

- a. Belanja Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah sebesar Rp3.600.000,00 dengan target sampai dengan Rp1.245.000,00 baru terealisasi Rp870.000,00 atau sebesar 24,17%. Belanja tersebut belum terserap dengan optimal karena belum ada belanja alat/bahan cetak.
- b. Belanja Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp2.270.606.000,00 dengan target sampai dengan Triwulan II Rp1.339.107.000,00, namun baru bisa terealisasi sebesar Rp497.846.700,00 dikarenakan belum adanya Camat Definitif dan salah satu Jabatan Kasi belum terisi.
- c. Belanja Penyediaan Bahan Logistik Kantor Rp13.284.900,00 dengan target Rp7.820.000,00 baru terserap Rp5.200.000,00 atau sebesar 39,14%. Belanja tersebut belum terserap dengan optimal karena jamuan tamu belum bias direalisasikan.
- d. Belanja Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Rp3.780.000,00 dengan target sampai dengan triwulan II sebesar Rp2.718.000,00 baru terserap Rp740.000,00 (19,58%). Pada kegiatan tersebut belum terserap maksimal karena kegiatan

perjalanan dinas belum dilaksanakan, sehingga realisasi untuk belanja perjalanan dinas dan BBM belum terserap.

- e. Belanja Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya sebesar Rp20.000.000,00, baru terserap Rp15.649.000,00 (78,25%). Sub Kegiatan tersebut sudah dilaksanakan, tetapi masih dalam proses pengerjaan sehingga belum dapat dilakukan SPJ.
- f. Belanja Pemeliharaan Mebel sebesar Rp1.250.000,00 dengan target 100% baru terealisasi Rp588.000,00 (47,04%). Belanja ini belum terserap optimal dikarenakan belum ada pemeliharaan yang dikerjakan.
- g. Belanja Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya sebesar Rp10.000.000,00 dengan target 100% baru bisa Realisasi keuangan 39,32%. Secara fisik sudah dilaksanakan, tetapi menunggu proses SPJ.
- h. Beberapa belanja seperti belanja Listrik dan telepon dalam perencanaannya hanya dapat diprediksikan dan tidak dapat dipastikan besaran kebutuhan yang diperlukan;
- i. Beberapa belanja pada kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa belum terserap optimal karena beberapa agenda desa belum bisa dilaksanakan.

Belum maksimalnya realisasi anggaran mengakibatkan terjadinya deviasi, sehingga pelaksanaan tidak sesuai dengan target. Implikasi selanjutnya terhadap Renstra PD adalah tidak tercapainya target jangka menengah yang telah ditetapkan.

Dari beberapa hambatan dan permasalahan di atas, maka selanjutnya akan dilakukan evaluasi berkala bersama pada pelaksana kegiatan masing-masing serta staff terkait untuk memaksimalkan realisasi sesuai dengan target anggaran. Evaluasi sampai dengan level rincian belanja perlu dilakukan untuk mengetahui lebih detail belanja yang belum maksimal dalam setiap sub kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Petanahan

Kinerja Kecamatan Petanahan diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Kebumen melalui serangkaian program dan kegiatan, baik yang menjadi kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Kebumen. Tabel 2.3 berikut menyajikan analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Petanahan yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.3
 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Kecamatan Petanahan dan
 Pencapaian Renstra Kecamatan Petanahan s/d Tahun 2024 Kabupaten Kebumen

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Petanahan

NO	Indikator	SPM/ standar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023(th n n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (tnn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	Tahun 2023 (thn n-2)	Tahun 2024 (thn n-1)	Tahun 2025 (thn n)	Tahun 2026 (thn n+1)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Capaian Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	-		88,36	90,38	91,40	92,42	93,69	92,73	94,33	95,00	-

Tabel 2.3 menunjukkan capaian Renstra PD berdasarkan survey kepuasan masyarakat di Kecamatan Petanahan. Realisasi telah melebihi nilai yang ditargetkan, yaitu target 88,36 pada tahun 2023 dengan capaian 93,69, serta target 90,38 pada tahun 2024 dengan capaian 92,73. Selanjutnya diproyeksikan untuk tahun 2025 sebesar 94,33 dan tahun 2026 sebesar 95,00. Penilaian untuk tahun 2025 masih berjalan.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Tujuan dari perumusan permasalahan dan isu strategis daerah adalah untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan/kegagalan kinerja pembangunan daerah dimasa lalu, khususnya yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimilikinya. Selanjutnya, identifikasi permasalahan pembangunan dilakukan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara terpisah atau sekaligus terhadap beberapa urusan. Hal ini bertujuan agar dapat dipetakan berbagai permasalahan yang terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah. Suatu permasalahan daerah memiliki nilai, prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, khususnya untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), termasuk didalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori

Tingkat Kinerja pelayanan Kecamatan Petanahan sampai dengan Tahun 2025 Triwulan II telah dilaksanakan secara cukup optimal, yaitu dengan mendekatinya prosentase capaian realisasi program dan kegiatan dari target yang ditetapkan dalam Renstra. Namun, masih ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam meningkatkan kinerja Kecamatan Petanahan sehingga menimbulkan dampak baik bagi instansi maupun masyarakat. Permasalahan dan dampaknya, yaitu sebagai berikut:

1. Belum optimalnya sarana dan prasarana yang ada di Kantor Kecamatan sebagai penunjang pelayanan, sehingga berpengaruh terhadap pelayanan. Contohnya kurangnya ketersediaan AC pada pelayanan PATEN dapat berpengaruh pada kenyamanan masyarakat saat mendapat pelayanan;
2. Belum semua pegawai mendapatkan diklat teknis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, sehingga beberapa tugas dan fungsi berjalan kurang optimal;
3. Masih perlu peningkatan kapasitas SDM Perangkat Desa sehingga masih ada kendala dalam penyelesaian APBDes sesuai dengan jadwal;
4. Rekapitulasi Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Petanahan tahun 2024: Desa Maju 7 (tujuh) Desa, Desa Berkembang 1 (satu) Desa dan Desa Mandiri 13 (tigabelas) Desa. Desa IDM tahun 2024 lebih meningkat dari tahun 2023. Untuk kedepan semoga Desa IDM sudah terealisasi menjadi Desa Mandiri semua di 21 (dua puluh satu) Desa.
5. Tanggapan yang masih rendah terhadap program-program yang disampaikan sehingga sering mendapatkan tagihan laporan dari instansi terkait karena laporan yang terlambat
6. Pelayanan Publik khususnya untuk KTP masih terkendala karena kurangnya pegawai pelayanan yang mampu mengoperasikan peralatan. Ketika pegawai tersebut menjalankan tugas lain, maka pelayanan menjadi terhambat.
7. Beberapa kali terjadi kendala jaringan dalam proses pelayanan Paten.
8. Belum optimalnya fungsi monitoring dan evaluasi anggaran sampai level belanja, sehingga sulit mengidentifikasi apa saja pos pos yang belum terealisasi maksimal.

Adanya permasalahan dan hambatan, serta dampak yang dihadapi Kecamatan Petanahan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan mengganggu kinerja pelayanan Kecamatan Petanahan jika tidak mendapatkan penyelesaian yang tepat yang pada akhirnya dapat mengurangi kontribusi Kecamatan Petanahan dalam mendukung tercapainya visi dan misi Kabupaten Kebumen.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang

efektif, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas, Kecamatan Petanahan masih menghadapi sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian serta sekaligus membuka peluang perbaikan dan pengembangan di masa mendatang. Salah satu tantangan utama adalah belum optimalnya sarana dan prasarana perkantoran sebagai penunjang pelayanan masyarakat. Kondisi fisik dan fasilitas yang terbatas, seperti kurangnya pendingin ruangan (AC) pada ruang pelayanan PATEN, berpengaruh terhadap kenyamanan masyarakat dan kinerja pegawai. Namun demikian, hal ini menjadi peluang untuk meningkatkan kualitas pelayanan melalui pengadaan dan modernisasi fasilitas kantor, yang sekaligus dapat meningkatkan citra pelayanan publik di Kecamatan Petanahan., Tantangan berikutnya adalah belum meratanya peningkatan kompetensi pegawai, terutama dalam hal pelatihan teknis sesuai bidang tugas. Masih ada pegawai yang belum mendapatkan diklat teknis sesuai ketentuan, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi belum berjalan maksimal. Kondisi ini membuka peluang pengembangan sumber daya aparatur melalui peningkatan kapasitas, baik melalui pelatihan teknis, bimbingan teknis, maupun kolaborasi antarperangkat daerah untuk memperkuat profesionalisme ASN di tingkat kecamatan.

Selain itu, kapasitas sumber daya manusia perangkat desa masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam penyusunan dan pelaporan keuangan desa agar penyelesaian APBDes dapat tepat waktu. Meskipun demikian, hal ini menjadi peluang bagi Kecamatan Petanahan untuk memperkuat fungsi pembinaan dan pendampingan terhadap desa, sehingga tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan lebih tertib, transparan, dan akuntabel.

Dari sisi pembangunan desa, Indeks Desa Membangun (IDM) Kecamatan Petanahan tahun 2024 menunjukkan tren yang positif, dengan capaian 13 Desa Mandiri, 7 Desa Maju, dan 1 Desa Berkembang. Peningkatan ini menjadi peluang besar untuk mendorong seluruh desa menuju status Desa Mandiri, melalui penguatan kolaborasi antarinstansi, optimalisasi potensi lokal, serta dukungan kebijakan pemberdayaan masyarakat desa.

Tantangan lainnya adalah rendahnya tanggapan dan ketepatan waktu pelaporan terhadap program-program yang disampaikan, yang berimplikasi pada keterlambatan penyampaian laporan kepada

instansi terkait. Kondisi ini sekaligus menjadi peluang untuk memperbaiki sistem komunikasi dan pelaporan, baik melalui digitalisasi proses pelaporan maupun peningkatan kesadaran tanggung jawab aparatur terhadap ketepatan waktu pelaporan kinerja.

Dari sisi pelayanan publik, masih terdapat kendala seperti terbatasnya pegawai yang memiliki kemampuan teknis mengoperasikan peralatan pelayanan KTP, serta kendala jaringan dalam pelayanan PATEN. Hal ini menjadi tantangan dalam menjaga kontinuitas pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, kondisi tersebut juga membuka peluang untuk memperkuat kompetensi teknis pegawai, melakukan pelatihan lintas fungsi, serta memperbaiki infrastruktur jaringan dan teknologi informasi agar pelayanan publik semakin cepat, mudah, dan responsif.

Tantangan lain yang perlu mendapat perhatian adalah belum optimalnya fungsi monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran hingga level belanja. Hal ini menyulitkan dalam mengidentifikasi pos-pos anggaran yang belum terealisasi secara maksimal. Situasi ini justru menjadi peluang untuk mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data serta aplikasi digital, yang dapat meningkatkan transparansi, akurasi, dan efektivitas pengelolaan anggaran di lingkungan Kecamatan Petanahan.

Secara keseluruhan, berbagai tantangan yang dihadapi Kecamatan Petanahan bukan hanya menunjukkan adanya keterbatasan, tetapi juga membuka ruang bagi peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan koordinasi antarinstansi, dan modernisasi tata kelola pemerintahan. Dengan memanfaatkan peluang-peluang tersebut secara optimal, Kecamatan Petanahan dapat mewujudkan pelayanan publik yang lebih profesional, akuntabel, dan berdaya saing, sekaligus berkontribusi nyata dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025–2029.

Formulasi Isu-Isu Penting, Rekomendasi, dan Catatan Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi internal dan capaian kinerja Kecamatan Petanahan, terdapat beberapa isu penting yang perlu menjadi perhatian dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan. Isu-isu ini merupakan permasalahan yang strategis, karena berpengaruh langsung terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pembinaan kepada desa.

1. Isu 1: Belum optimalnya sarana dan prasarana perkantoran sebagai penunjang pelayanan masyarakat.
 - Rekomendasi Strategis: Diperlukan peningkatan kualitas dan kelengkapan sarana prasarana kantor kecamatan, terutama ruang pelayanan publik (PATEN), melalui kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Catatan: Penguatan fasilitas fisik, seperti pendingin ruangan (AC), ruang tunggu yang representatif, dan peralatan layanan digital, akan meningkatkan kenyamanan masyarakat serta mendukung profesionalisme pelayanan.
2. Isu 2: Belum semua pegawai memperoleh diklat teknis sesuai bidang tugas dan peraturan yang berlaku.
 - Rekomendasi Strategis: Mendorong peningkatan kompetensi aparatur melalui kegiatan pelatihan, bimbingan teknis, dan workshop yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi.
 - Program Terkait: *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota* – kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah serta Administrasi Umum Perangkat Daerah.
 - Catatan: Peningkatan kapasitas ASN secara berkelanjutan akan memperkuat pelaksanaan tugas pelayanan publik dan memperbaiki kualitas perencanaan serta pelaporan kinerja kecamatan.
3. Isu 3: Masih perlu peningkatan kapasitas SDM perangkat desa, terutama dalam penyusunan dan pelaporan APBDes tepat waktu.
 - Rekomendasi Strategis: Melaksanakan kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan fokus pada peningkatan kemampuan administrasi dan keuangan desa.
 - Catatan: Penguatan kapasitas perangkat desa akan berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa dan mempercepat terwujudnya desa mandiri.
4. Isu 4: Capaian Indeks Desa Membangun (IDM) yang meningkat, namun belum seluruh desa mencapai kategori mandiri.

- Rekomendasi Strategis: Menjadikan peningkatan IDM sebagai indikator kinerja utama dalam program pembinaan desa. Kecamatan perlu berkolaborasi dengan OPD terkait dan pemerintah desa untuk mempercepat peningkatan status desa menjadi mandiri.
 - Program Terkait: *Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa*.
 - Catatan: Keberhasilan peningkatan IDM akan mendukung pencapaian visi pembangunan daerah, sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi dan sosial masyarakat di wilayah Kecamatan Petanahan.
5. Isu 5: Masih rendahnya ketepatan waktu pelaporan terhadap program yang dilaksanakan, sehingga sering terlambat dalam penyampaian laporan ke instansi terkait.
- Rekomendasi Strategis: Diperlukan perbaikan sistem administrasi pelaporan berbasis digital serta penegasan mekanisme koordinasi internal antar-seksi.
 - Program Terkait: *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota* – kegiatan Administrasi Umum dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - Catatan: Penerapan disiplin pelaporan dan penggunaan sistem informasi kinerja (e-Sakip) akan mempercepat proses evaluasi dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
6. Isu 6: Pelayanan publik, khususnya perekaman dan penerbitan KTP, masih terkendala keterbatasan pegawai yang menguasai peralatan dan sistem pelayanan.
- Rekomendasi Strategis: Menyusun kebijakan peningkatan kapasitas teknis pegawai pelayanan melalui pelatihan operasional peralatan administrasi kependudukan, serta penataan ulang pembagian tugas agar pelayanan tidak terhenti saat pegawai tertentu berhalangan.
 - Program Terkait: *Program Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pelayanan Publik* – kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan yang Dilimpahkan.

- Catatan: Penguatan SDM pelayanan publik akan meningkatkan kecepatan dan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi kependudukan.
7. Isu 7: Kendala jaringan dalam proses pelayanan PATEN yang berdampak pada keterlambatan pelayanan.
- Rekomendasi Strategis: Meningkatkan koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk perbaikan dan pemeliharaan jaringan internet secara berkala, serta menyiapkan alternatif jaringan cadangan.
 - Program Terkait: *Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* – kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
 - Catatan: Keandalan sistem jaringan menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pelayanan PATEN berbasis teknologi informasi.
8. Isu 8: Belum optimalnya fungsi monitoring dan evaluasi anggaran hingga level belanja, sehingga belum tergambarkan secara utuh realisasi kinerja keuangan.
- Rekomendasi Strategis: Perlu penguatan fungsi monitoring dan evaluasi keuangan melalui kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, serta peningkatan kompetensi staf dalam analisis realisasi anggaran.
 - Catatan: Penerapan sistem pengawasan dan evaluasi anggaran yang lebih rinci akan mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal penyusunan RKPD Tahun 2025 yang disusun sesuai hasil analisis kebutuhan, didalam proses penetapannya mengalami perubahan walaupun tidak signifikan, hal ini dikarenakan beberapa hal, diantaranya:

- a. Adanya peraturan dan kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam bentuk rasionalisasi dan refocusing anggaran. Beberapa anggaran pada program dan kegiatan berkurang anggaran sehingga perlu penyesuaian.
- b. Alokasi anggaran yang diberikan kepada Kecamatan Petanahan, khususnya anggaran kuota kecamatan yang sebelumnya

diberikan, sedangkan saat ini ditarik kembali;

- c. Perubahan situasi dan kondisi lingkungan di Kecamatan Petanahan.

Perbandingan Program/Kegiatan yang disusun berdasarkan dokumen Rancangan Awal RKPD dan hasil analisis kebutuhan ditunjukkan pada tabel 2.5 sebagai berikut:

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kecamatan Petanahan

No	Pagu Renja 2025					Pagu Perubahan Renja 2025					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	KECAMATAN PETANAHAN				Rp3.547.401.735.00					Rp2.581.372.700,00	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Petanahan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	100 %	Rp2.188.039.735.00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kec. Petanahan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.	100 %	Rp2.396.887.200,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Petanahan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	Rp10.000.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Petanahan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Dokumen	Rp9.228.300,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.	Kec. Petanahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	Rp6.000.000,00	Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah	Kec. Petanahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	Rp5.628.300,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Petanahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Rp4.000.000,00	Penyusunan Laporan Kegiatan	Kec. Petanahan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan	Rp3.600.000,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Petanahan	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan	12 Bulan	2.002.178.735,00	Kegiatan: Administrasi Keuangan	Kec. Petanahan	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan	12 Bulan	Rp2.218.247.400,00	

No	Pagu Renja 2025					Pagu Perubahan Renja 2025					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	KECAMATAN PETANAHAN				Rp3.547.401.735,00					Rp2.581.372.700,00	
			Perangkat Daerah			Perangkat Daerah		Perangkat Daerah			
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Petanahan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	Rp1.988.178.735,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Petanahan	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	17 Orang/bulan	Rp2.204.980.000,00	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Kec. Petanahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	Rp14.000.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Kec. Petanahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dokumen	Rp13.267.400,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Petanahan	Jumlah bulan penyediaan kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	48.461.000,00	Kegiatan: Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Petanahan	Jumlah Bulan Penyediaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	12 Bulan	Rp42.394.900,00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Petanahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	Rp2.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Petanahan	Jumlah Jenis Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor	4 paket	Rp2.000.000,00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Petanahan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	12 Paket	Rp14.761.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Petanahan	Jumlah Bulan Penyediaan makanan dan Minuman rapat	12 Paket	Rp13.284.900,00	
	Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Petanahan	Jumlah Paket barang Cetak dan	12 Paket	Rp8.000.000,00	Penyediaan barang	Kec. Petanahan	Jumlah Bulan Penyediaan barang Cetak dan	12 Paket	Rp7.200.000,00	

No	Pagu Renja 2025					Pagu Perubahan Renja 2025					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	KECAMATAN PETANAHAN				Rp3.547.401.735.00					Rp2.581.372.700,00	
			Penggandaan yang disediakan			Catatan dan Penggandaan		dan Penggandaan			
	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Petanahan	Jumlah Dokumen Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12 Dokumen	Rp2.000.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Petanahan	Jumlah Bulan Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12 Dokumen	Rp2.000.000,00	
	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Petanahan	Jumlah Paket Bahan/Material yang disediakan	12 Paket	Rp14.000.000,00	Penyediaan Bahan/Material	Kec. Petanahan	Jumlah Bulan Penyediaan Alat Tulis Kantor	12 Paket	Rp12.600.000,00	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Petanahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	Rp6.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kec. Petanahan	Jumlah Bulan Penyelenggaraan rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	12 Laporan	Rp3.780.000,00	
	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kecamatan Petanahan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen	Rp1.700.000,00	Penatausahaan Arsip Dinamis Pada SKPD	Kec. Petanahan	Jumlah Bulan Penatausahaan Arsip Dinamis	12 Dokumen	Rp1.530.000,00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Petanahan	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	4 Unit	Rp35.750.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Petanahan	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah	4 Unit	Rp35.750.000,00	
	Pengadaan Mebel	Kec. Petanahan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	1 Unit	Rp750.000,00	Pengadaan Mebel	Kec. Petanahan	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	2 Unit	Rp750.000,00	

No	Pagu Renja 2025					Pagu Perubahan Renja 2025					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	KECAMATAN PETANAHAN				Rp3.547.401.735.00					Rp2.581.372.700,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Petanahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang di sediakan	2 Unit	Rp15.000.000,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Petanahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang di sediakan	3 Unit	Rp15.000.000,00	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Petanahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang disediakan	2 Unit	Rp20.000.000,00	Pengada an Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Petanahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang disediakan	2 Unit	Rp20.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Petanahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Bulan	Rp32.400.000,00	Penyedia an Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Petanahan	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12 Laporan	Rp32.016.600,00	
	Penyediaan Jasa Surat menyurat		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	12 Laporan	Rp400.000,00	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Kec. Petanahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat menyurat	12 Laporan	Rp400.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Petanahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	Rp27.000.000,00	Penyedia an Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Petanahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	Rp27.000.000,00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Petanahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	Rp5.000.000,00	Penyediaan Jasa	Kec. Petanahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan	12 Laporan	Rp4.616.600,00	

No	Pagu Renja 2025					Pagu Perubahan Renja 2025					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	KECAMATAN PETANAHAN				Rp3.547.401.735.00					Rp2.581.372.700,00	
			Umum Kantor yang disediakan			Pelayanan Umum Kantor		Umum Kantor yang disediakan			
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Petanahan	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16 Unit	Rp59.250.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Petanahan	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6 Unit	Rp59.250.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Petanahan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit	Rp46.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. Petanahan	Jumlah Kendaraan Dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	6 Unit	Rp46.000.000,00	
	Pemeliharaan Mebel	Kec. Petanahan	Jumlah Mebel yang dipelihara	4 Unit	Rp1.250.000,00	Pemeliharaan Mebel	Kec. Petanahan	Jumlah Mebel yang dipelihara	4 Unit	Rp1.250.000,00	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Petanahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	8 Unit	Rp2.000.000.00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kec. Petanahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	6 Unit	Rp2.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Petanahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi.	2 Unit	Rp10.000.000,00	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kec. Petanahan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	2 Unit	Rp10.000.000,00	

No	Pagu Renja 2025					Pagu Perubahan Renja 2025					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	KECAMATAN PETANAHAN				Rp3.547.401.735.00					Rp2.581.372.700,00	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Petanahan	<i>Prosentase cakupan penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik</i>	100%	Rp1.197.093.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Petanahan	<i>Prosentase cakupan penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik</i>	100 %	Rp42.314.500,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat	Kec. Petanahan	Prosentase terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	Rp1.197.093.000,00	<i>Penyelenggara an Pemerintahan dan Pelayanan Publik</i>	Kec. Petanahan	<i>Prosentase terlaksananya Uruan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat</i>	100%	Rp42.314.500,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kec. Petanahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	9 Laporan	Rp38.087.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non Perizinan	Kec. Petanahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	9 Laporan	Rp37.314.500,00	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Petanahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	21 Laporan	Rp1.159.006.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Petanahan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	21 Laporan	Rp5.000.000,00	
3	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Petanahan	Cakupan terselenggaranya urusan pemerintahan umum	100 %	Rp21.002.000,00	Program Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Petanahan	Cakupan terselenggaranya urusan pemerintahan umum	100 %	Rp19.002.800,00	

No	Pagu Renja 2025					Pagu Perubahan Renja 2025					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	KECAMATAN PETANAHAN				Rp3.547.401.735.00					Rp2.581.372.700,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Petanahan	Jumlah kegiatan penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	2 Kegiatan	Rp21.002.000,00	Kegiatan: Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum	Kec. Petanahan	Jumlah kegiatan penyelenggaraa n urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	2 Kegiatan	Rp19.002.800,00	
	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Petanahan	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	2 Orang	Rp21.002.000,00	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Kec. Petanahan	Jumlah kegiatan dalam rangka HUT RI (Hari Jadi, Karnaval, Resepsi HUT RI)	2 Orang	Rp19.002.800,00	

No	Pagu Renja 2025					Pagu Perubahan Renja 2025					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	KECAMATAN PETANAHAN				Rp3.547.401.735.00					Rp2.581.372.700,00	
4	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Petanahan	Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	Rp141.267.000,00	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Petanahan	Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100 %	Rp123.168.200,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Petanahan	Jumlah fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan	44 %	Rp.141.267.000,00	Kegiatan: Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Petanahan	Jumlah fasilitasi rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	44 %	Rp123.168.200,00	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kec. Petanahan	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	21 Dokumen	Rp31.545.000,00	Fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	Kec. Petanahan	Jumlah desa yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan asset desa	13 Dokumen	Rp28.455.800,00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Petanahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	19 Dokumen	Rp5.600.000,00	Fasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa	Kec. Petanahan	Jumlah desa yang difasilitasi pemilihan Kepala Desa	19 Dokumen	Rp5.200.000,00	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan	Kec. Petanahan	Jumlah dokumen Sinkronisasi	2 Dokumen	Rp18.000.000,00	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan	Kec. Petanahan	Jumlah dokumen Sinkronisasi	2 Dokumen	Rp16.680.000,00	

No	Pagu Renja 2025					Pagu Perubahan Renja 2025					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	KECAMATAN PETANAHAN				Rp3.547.401.735.00					Rp2.581.372.700,00	
	Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.		Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa			Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.		Percepatan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa (Profil dan IPMD)			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Petanahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	2 Dokumen	Rp11.000.000,00	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kec. Petanahan	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	2 Dokumen	Rp9.060.000,00	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Petanahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	2 Dokumen	Rp24.000.000,00	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Kec. Petanahan	Jumlah kegiatan fasilitasi penyelenggaraan Musrenbang des/ Kel dan Musrenbang cam	2 Dokumen	Rp21.769.000,00	
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Petanahan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	4 Dokumen	Rp41.000.000,00	Fasilitasi Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Kec. Petanahan	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa (PKK, UKS, Bumdes, Sosial Masyarakat)	4 Dokumen	Rp33.313.600,00	
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Petanahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi	2 Laporan	Rp10.122.000,00	Koordinasi Pendampi	Kec. Petanahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan	2 Laporan	Rp8.689.800,00	

No	Pagu Renja 2025					Pagu Perubahan Renja 2025					Catatan Penting
	Program /Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
	KECAMATAN PETANAHAN				Rp3.547.401.735.00					Rp2.581.372.700,00	
			Pendampingan Desa di Wilayahnya			ngan Desa di wilayahnya		Desa di Wilayahnya			
					3.547.401.735.00					2.581.372.700	

Pada table 2.5 di atas ditunjukkan rancangan awal program, kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Renja Kecamatan Petanahan Tahun 2025. Anggaran tersebut selanjutnya dilakukan penyesuaian dengan renstra 2021-2026 dan sudah sesuai. Pagu anggaran perubahan sebesar Rp. 2.581.372.700,00 untuk mendanai 4 Program, 9 Kegiatan dan 31 Sub Kegiatan. Beberapa penyesuaian dilakukan karena adanya refocusing anggaran dari Kabupaten Kebumen.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang menjadi prioritas utama dari program dan kegiatan Kecamatan Petanahan diperoleh dari masyarakat (para pemangku kepentingan), dengan melalui forum musyawarah perencanaan Pembangunan (musyawarah rencana pembangunan Kecamatan) yang pelaksanaannya dimulai dari musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa (musrenbangdes/Desa) hingga musyawarah perencanaan pembangunan Kecamatan (Musrenbangcam) tahun 2023. Melalui forum musrenbang tersebut kecamatan dan desa memfasilitasi serta mengakomodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat sehingga disepakati beberapa usulan, diantaranya:

1. Usulan Desa

Setiap tahun dalam pelaksanaan Musrenbang tingkat desa disepakati usulan-usulan pembangunan desa yang nantinya akan dimusyawarahkan dalam Musrenbang tingkat Kecamatan. Setiap desa diperkenankan mengajukan 6 usulan yang selanjutnya dilakukan peng-input-an di aplikasi SIPD perencanaan untuk kemudian dibawa ke forum-forum OPD dan juga akan dibawa ke Musrenbang Kabupaten.

Untuk usulan pembangunan tahun 2025 seluruh desa di Kecamatan Petanahan yang berjumlah 21 desa mengusulkan 6 usulan sehingga terdapat 126 usulan desa yang diusulkan ke dinas terkait. Usulan Desa dilaksanakan di minggu keempat Bulan Agustus Tahun 2024.

2. Usulan Bantuan Keuangan Provinsi

Selain pengusulan pembangunan baik fisik maupun non-fisik melalui APBD Kabupaten, di Tahun 2025 desa maupun kecamatan diberikan kesempatan untuk menyampaikan usulan pembangunan yang nantinya akan dianggarkan melalui APBD Provinsi.

Pengusulan tersebut dilakukan melalui aplikasi *e-planning* Jateng. Seluruh Desa dan Kecamatan Petanahan diberikan akun untuk mengusulkan pembangunan wilayahnya melalui aplikasi tersebut. Usulan Bantuan Keuangan Provinsi akan dilaksanakan di minggu ke empat Bulan Agustus Tahun 2024.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tugas dan fungsi kecamatan adalah meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan desa. Oleh karena itu, kecamatan lebih banyak berperan dalam hal peningkatan koordinasi dan fasilitasi terhadap kebijakan-kebijakan nasional dengan melaksanakan komunikasi intensif dengan instansi-instansi terkait dalam bidang pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dan desa. Perencanaan strategis disusun sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya, yang mana diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta dapat mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Beberapa Program Prioritas Nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi kecamatan, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Beberapa Program Prioritas Provinsi yang terkait, yaitu:

1. Menjaga stabilitas sosial, ekonomi, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat.
2. Pengendalian inflasi dan ketahanan pangan.
3. Penuntasan pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan angka pengangguran dan stunting.
4. Penanganan dampak perubahan iklim (kekeringan, polusi, dan

karhutla).

5. Peningkatan kualitas sistem Pendidikan vokasi.
6. Pengembangan pariwisata dan peningkatan daya saing UMKM di sektor ekonomi kreatif.
7. Pengembangan sistem ekonomi sirkular dan transisi energi.
8. Pengembangan layanan publik dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
9. Meningkatkan pengawasan internal Aparatur Sipil Negara (ASN)

Dalam rangka mewujudkan sinkronisasi program dari pusat ampai ke daerah perencanaan program dan kegiatan Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen disusun dengan merujuk pada kebijakan Nasional untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan agar sesuai dengan yang direncanakan. Tema yang diusung dalam dalam RKP 2025 adalah "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 merupakan tahap pertama pembangunan dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2025-2045, serta RKP 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan RPJMN 2025-2029. RKP 2025 dan RPJMN 2025-2029 ini menjadi fondasi penting dalam mencapai sasaran dan target RPJPN 2025-2045, menuju visi Indonesia emas 2045.

Kecamatan Petanahan mempunyai tugas untuk mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kebumen 2021-2026 yang merupakan perwujudan dari visi misi pasangan H. Arif Sugiyanto, S.H selaku Bupati dan Hj. Ristawati Purwaningsih, [S.ST](#), MM selaku Wakil Bupati Kebumen. Visi Kabupaten Kebumen sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021 2026 adalah: "Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat. Berdasarkan penjabaran dari Visi Bupati dan Wakil Bupati dan hasil analisa isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Kebumen tahun 2021 2026 dapat diuraikan bahwa isu-isu strategis yang terkait langsung dengan tupoksi Kecamatan Petanahan adalah: "Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi".

3.2. **Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah**

Berdasarkan rumusan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan pada Renstra Kecamatan Petanahan Tahun 2021-2026 maka tujuan dari

Kecamatan Petanahan sesuai RPJMD Kabupaten Kebumen adalah untuk mencapai misi "Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi". Tujuan dan Sasaran yang akan dicapai dalam Renja Kecamatan Petanahan tahun 2025 disajikan pada tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Urusan Renja Kecamatan Petanahan
Tahun 2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA URUSAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik oleh kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	91,40

3.3. **Program dan Kegiatan**

Program merupakan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalani misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sedangkan kegiatan merupakan suatu tindakan dari penjabaran program untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan yang telah digariskan.

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan di Kecamatan Petanahan yaitu:
 - a. Pencapaian Visi dan misi Kepala Daerah.
 Perumusan Program dan kegiatan Kecamatan Petanahan diarahkan untuk mendukung tercapainnya Visi dan Misi Kepala Daerah dan sesuai dengan fungsi atau urusan yang menjadi wewenangnyanya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
 - b. Pengentasan Kemiskinan.
 Kemiskinan adalah suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan seseorang atau keluarga untuk memenuhi ke-butuhan dasarnya yaitu kebutuhan makan, sandang, papan atau perumahan dan Kesehatan. Indonesia dengan jumlah penduduk

nomor 4 terbanyak di dunia tentunya tidak terlepas dari masalah kemiskinan. Untuk mengurangi jumlah masyarakat yang hidup miskin, Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan pemerintah provinsi dan Kabupaten/kota terus berupaya untuk mengentaskan kemiskinan dengan berbagai program kemiskinan.

c. Pelayanan PATEN yang berkualitas

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak terlepas dari norma, aturan, standart ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggung jawabkan dan berkinerja tinggi. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal, Kecamatan Petanahan telah menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan Petanahan diarahkan untuk meningkatkan pencapaian standar pelayanan minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan hal tersebut adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatannya adalah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Non Perijinan

d. Pendampingan Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan APBDes

Dalam rangka memfasilitasi desa dalam pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, Kecamatan Petanahan mengusung Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa. Penyusunan program dan kegiatan Kecamatan Petanahan diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keugan dan aset desa, sehingga menimbulkan tertib administrasi desa.

Pendampingan BUMDes dan Pemberdayaan Masyarakat.

e. Dalam rangka menggali potensi potensi desa dan pemberdayaan masyarakat desa, Program yang ada masih Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa sedangkan kegiatan yang dilakukan adalah Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat.

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program, kegiatan dan sub kegiatan Jumlah Program.

Jumlah Program dan jumlah kegiatan Renja Kecamatan Petanahan tahun 2025 yang di usulkan mencakup 4 (Program) program dan 9 (Sembilan Kegiatan) dan 31 (Tiga Puluh Satu) Sub kegiatan Total kebutuhan Dana/Pagu Indikatif. Total kebutuhan Dana / Pagu Indikatif perubahan yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 2.581.372.700,00 (Dua miliar lima ratus delapan puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah) yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU).

3. Penjelasan Rumusan Program dan Kegiatan di Kecamatan Petanahan
Rumusan Program dan kegiatan renja 2025 sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, Pagu Indikatif perubahan maupun kombinasi keduanya. Program dan Kegiatan merupakan rencana aksi dari Perangkat daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Adapun masing -masing Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan adalah sebagai berikut:

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota

Kegiatan:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Ada 2 Sub Kegiatan yaitu;
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan sejumlah 2 Sub Kegiatan;
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
3. Administrasi Umum sejumlah 7 Sub Kegiatan;
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

- Penyediaan Bahan/Material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan 2 sub kegiatan:
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya,
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana kantor
 5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sejumlah 3 Sub Kegiatan;
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sejumlah 4 Sub Kegiatan;
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Mebel
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik; Ada 2 (dua) kegiatan
1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan,
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan lain yang dilimpahkan
- 3) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum; Ada 1 (satu) Kegiatan
1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah, Sub Kegiatan

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara

- 4) Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
1. Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan 7 sub kegiatan diantaranya;
- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
 - Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
 - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Selanjutnya Rencana kerja Kecamatan Petanahan tahun 2025 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.2
Program dan Kegiatan/Sub Kegiatan

NO	NAMA PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Pelaksanaan, Penatausahaan dan Pengujian /Veifikasi Keuangan OPD.
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakn dan Penggandaan

NO	NAMA PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
			Penyediaan Bahan/Material
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi OPD
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada OPD
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pengadaan Mebel
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pengadaan Sarana Prasarana Bangunan dan Gedung kantor Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Mebel
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan daerah Pelayanan PublikK	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Nonperizinan
			Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
3.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
4.	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa
			Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

NO	NAMA PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
		Pemerintahan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa
			Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
			Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif
			Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
			Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya

Total kebutuhan dana/pagu untuk Perubahan Renja Tahun Anggaran 2025 Rp. 2.581.372.700,00 dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 3.3

Rincian Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pagu Anggaran Perubahan

Program	Kegiatan	Pagu	Sumber Dana
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.396.887.200.00	DAU
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.228.300.00	DAU
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.628.300.00	DAU
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3.600.000.00	DAU
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.216.247.400.00	DAU
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.	2.204.980.000.00	DAU
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan Perangkat Daerah	13.267.400.00	DAU
	Administrasi Umum	42.394.900.00	DAU
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.000.000.00	DAU
	Penyediaan Bahan	13.284.900.00	DAU

	Logistik Kantor		
	Penyediaan Barang dan Penggandaan Cetakan	7.200.000.00.	DAU
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan	2.000.000.00	DAU
	Penyediaan Bahan /Material	12.600.000.00	DAU
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3.780.000.00	DAU
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.530.000.00	DAU
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	35.750.000.00	DAU
	Pengadaan Mebel	750.000.00	DAU
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	15.000.000.00	DAU
	Pengadaan Sarana dan Prasaran Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.	20.000.000.00	DAU
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	32.016.600.00	DAU
	Penyediaan Jasa Surat menyurat.	400.000.00	DAU
	Penyediaan Jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	27.000.000.00	DAU
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4.616.600.00	DAU
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.250.000	DAU
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	46.000.000.00	DAU
	Pemeliharaan Mebel	1.250.000.00	DAU
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.000.000.00	DAU
	Pemeliharaan /rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.000.000.00	DAU
Program Penyelenggaraan Pemerintahan	Presentase Cakupan Penyelenggaraan	42.314.500.00	DAU

dan Pelayanan Publik	Pemerintahan dan Pelayanan Publik		
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	42.314.500.00	DAU
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	37.314.500.00	DAU
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	5.000.000.00	DAU
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Cakupan terselenggaranya urusam Pemerintahan Umum	19.002.800.00	DAU
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	19.002.800.00	DAU
	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang Undang Dasar NKRI Tahun 1945, Pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan NKRI.	19.002.800.00	DAU
Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	123.168.200.00	DAU
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	123.168.200.00	DAU
	Fasilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	28.455.800.00	DAU
	Fasilitas Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.	5.200.000.00	DAU

	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa.	16.680.000.00	DAU
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	9.060.000.00	DAU
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	21.769.000.00	DAU
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	33.313.600.00	DAU
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	8.689.800.00	DAU
	Jumlah Pagu	2.581.372.700.00	DAU

Pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di Kecamatan Petanahan memiliki karakteristik penyebaran yang beragam, bergantung pada sasaran, jenis urusan pemerintahan, dan lokasi pelaksanaannya.

1. Program dan Kegiatan yang Tersebar ke Berbagai Kawasan

Kegiatan dengan sifat tersebar umumnya berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pemerintahan umum, pembinaan desa, serta kegiatan yang mendukung koordinasi lintas wilayah desa. Program-program tersebut diarahkan untuk menjangkau seluruh 21 desa di wilayah Kecamatan Petanahan secara merata, agar tidak terjadi kesenjangan pelayanan maupun pembangunan antarwilayah.

Kegiatan yang termasuk dalam kategori ini antara lain:

- Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum, melalui subkegiatan *Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional* yang dilaksanakan di seluruh desa. Kegiatan ini melibatkan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan unsur lembaga kemasyarakatan dalam rangka menumbuhkan kesadaran bela negara serta memperkuat nilai-nilai kebangsaan.
- Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, dengan berbagai subkegiatan seperti *Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa*, *Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa*, dan *Koordinasi Pendampingan Desa*. Seluruh

kegiatan ini dilaksanakan di setiap desa untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa, meningkatkan kapasitas aparatur, dan mempercepat pencapaian status Desa Mandiri.

- Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Pelayanan Publik, khususnya kegiatan *Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan*, juga memiliki sifat penyebaran karena pelayanan nonperizinan dan pelayanan administrasi publik menjangkau seluruh lapisan masyarakat di berbagai wilayah.

Kegiatan yang tersebar ini mencerminkan komitmen Kecamatan Petanahan terhadap asas pemerataan pembangunan dan pelayanan publik, dengan tujuan agar seluruh wilayah memperoleh akses yang sama terhadap layanan pemerintahan dan pembinaan.

2. Program dan Kegiatan yang Terfokus pada Kawasan atau Kelompok Masyarakat Tertentu

Sebagian kegiatan bersifat terfokus pada lokasi tertentu (khususnya kantor kecamatan) atau kelompok sasaran tertentu seperti aparatur pemerintah dan masyarakat penerima layanan. Fokus kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas layanan, efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta efisiensi pengelolaan sumber daya.

Kegiatan yang termasuk kategori ini antara lain:

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, yang meliputi kegiatan *Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, serta Administrasi Umum Perangkat Daerah*. Seluruh subkegiatan seperti penyusunan dokumen perencanaan, penyediaan bahan logistik, penyediaan jasa komunikasi dan listrik, serta pemeliharaan gedung kantor difokuskan pada lokasi kantor Kecamatan Petanahan sebagai pusat administrasi dan pelayanan.
- Subkegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan, seperti pengadaan mebel, peralatan, mesin, serta sarana prasarana gedung kantor, juga bersifat terfokus pada lingkungan kantor kecamatan. Tujuannya adalah meningkatkan kenyamanan dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat, terutama pada ruang pelayanan PATEN.
- Subkegiatan Pelaksanaan Urusan Nonperizinan dan Pelayanan Publik, berpusat di unit pelayanan kecamatan dengan sasaran langsung

masyarakat pengguna layanan administrasi kependudukan dan layanan publik lainnya.

- Kegiatan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa, yang bersifat terfokus pada desa tertentu yang menyelenggarakan pemilihan kepala desa, tidak dilaksanakan di seluruh desa setiap tahun.

Dengan demikian, kegiatan yang terfokus ini lebih diarahkan untuk meningkatkan kualitas internal penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat kapasitas aparatur, dan menyediakan sarana pendukung layanan publik yang efektif.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN PETANAHAN

4.1 Prioritas Perangkat Daerah Yang Mendukung Prioritas Kabupaten

Rencana kerja dan pendanaan Tahun 2025 berisi program dan kegiatan serta pagu indikatif, yang dirancang untuk mendukung terwujudnya capaian visi, misi dan tujuan RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026 dan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, dan prioritas perangkat daerah dalam pemenuhan standar pelayanan minimal, maupun untuk pemenuhan pelayanan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kebumen 2021-2026, yaitu *“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri, Berakhlak Bersama Rakyat”* ditempuh melalui lima misi. Oleh Karena itu untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten Kebumen ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi, maka dapat ditelaah dari Misi ke 1 (satu) yaitu *“Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi”*.

Prioritas pendanaan di Kecamatan Petanahan Tahun 2025 memperhatikan Renstra Kecamatan Petanahan Tahun 2021-2026, Capaian RKPD Tahun 2023 serta mengakomodir beberapa isu strategis yang dapat dicapai. Rencana kerja dan kegiatan prioritas Kecamatan Petanahan mendukung Prioritas Kabupaten Tahun 2025, adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 4.1.
Prioritas Perangkat Daerah yang Mendukung Prioritas Kabupaten

Kode Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Ket.
7.01.001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	2.396.887.200,00	
7.01.001.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.228.300,00	
7.01.001.2.02	Administrasi keuangan perangkat daerah	2.218.247.400,00	

Kode Program/Kegiatan	Program/Kegiatan	Pagu Dana (Rp)	Ket.
7.01.001.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	42.394.900,00	
7.01.01.2.07	Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	35.750.000,00	
7.01.001.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	32.016.600,00	
7.01.001.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	59.250.000,00	
7.01.002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	42.314.500,00	
7.01.002.2.04	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	42.314.500,00	
7.01.005	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	19.002.800,00	
7.01.005.2.01	Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	19.002.800,00	
7.01.006	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	123.168.200,00	
7.01.006.2.01	Fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	123.168.200,00	
Jumlah Pagu		2.581.372.700,00	

4.2 Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pendanaan Kecamatan Petanahan Tahun 2025 untuk pemenuhan pelayanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, dapat dilihat pada tabel berikut.

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Kecamatan Petanahan Tahun 2025 disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka penyesuaian terhadap perubahan kebijakan, prioritas pembangunan daerah, serta kondisi aktual yang terjadi di lapangan. Dokumen ini menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di wilayah Kecamatan Petanahan.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, antara lain:

1. Ketersediaan anggaran yang terbatas menuntut pelaksanaan kegiatan dilakukan secara efisien, efektif, dan berprioritas tinggi, dengan memfokuskan pada kegiatan yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
2. Koordinasi lintas bidang dan lintas sektor harus terus diperkuat agar pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sinergis.
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perlu dilakukan secara berkala untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan realisasi serta sebagai dasar perbaikan kebijakan pada periode berikutnya.
4. Peningkatan kapasitas aparatur dan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ke dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, juga perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) untuk periode 1 (satu) tahun. Sasaran program dan kegiatan Pembangunan di dalam Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 dan Renja-PD telah diselaraskan dengan sasaran yang tercantum dalam dokumen Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah 2024-2026, sehingga turut berkontribusi terhadap capaian sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi.

Penyusunan Perubahan Renja didasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan tahapan:

1. Persiapan Penyusunan;
2. Penyusunan Rancangan Awal;
3. Penyusunan Rancangan;
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
5. Perumusan Rancangan Akhir; dan
6. Penetapan.

Adapun rencana tindak lanjut dari pelaksanaan Renja Perubahan Tahun 2025 meliputi:

1. Melakukan penajaman target dan indikator kinerja untuk menjamin keterukuran capaian setiap kegiatan;
2. Menyusun rencana aksi pengendalian dan evaluasi secara periodik untuk memastikan efektivitas pelaksanaan; dan
3. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi antara kecamatan, perangkat desa, serta instansi teknis dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Selanjutnya Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 ini digunakan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) dan Dokumen Perencanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun 2025.

Dengan komitmen seluruh aparaturnya dan dukungan masyarakat, pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Petanahan Tahun 2025 diharapkan dapat berjalan dengan baik, serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik di wilayah Kecamatan Petanahan.

Petanahan, 26 Juni 2025
CAMAT PETANAHAN

ARIS YUNANTO, S.IP. M.Si
Pembina Tingkat I/IV.b
NIP : 19690927 198911 1 001

BERITA ACARA
KESEPAKATAN HASIL MUSRENBANG RKPD KABUPATEN KEBUMEN DI
KECAMATAN PETANAHAN KABUPATEN KEBUMEN

Pada hari Rabu tanggal dua puluh dua bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga telah diselenggarakan Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen yang dihadiri pemangku kepentingan sesuai dengan daftar hadir sebagaimana tercantum dalam Lampiran berita acara ini.

Setelah memperhatikan, mendengar, dan mempertimbangkan :

1. Pemaparan materi :
 - a. Potensi wilayah dan permasalahan di Kecamatan Petanahan oleh Bapak Drs. Edy Purwoko, M.Si Camat Petanahan;
 - b. Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2025 oleh Ibu Yunita P., dan Bapak Tauhid dari Badan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kebumen;
2. Penyepakatan Daftar Prioritas Usulan Desa/Kelurahan Tahun 2025 sebagai usulan kegiatan Pembangunan di wilayah Kecamatan Petanahan tahun 2025 yang akan di usulkan ke Perangkat Daerah.
3. Pemilihan dan penetapan daftar nama delegasi kecamatan sebanyak 6 (enam) orang yang terdiri dari unsur Kecamatan, Unsur Desa, dan perwakilan perempuan atau kelompok masyarakat untuk menjadi peserta Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kabupaten.
4. Penandatanganan Berita Acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan Petanahan.
5. Tanggapan dan saran dari seluruh peserta Musrenbang RKPD di Kecamatan Petanahan terhadap materi yang dipaparkan sebagaimana telah dirangkum menjadi hasil keputusan Musrenbang RKPD Kabupaten Kebumen di Kecamatan Petanahan, maka pada:

Hari/ Tanggal : Rabu, 22 November 2023

Jam : 09.00 s.d. Selesai

Tempat : AULA Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen

Musrenbang RKPD di Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen tahun 2023.

MENYEPAKATI

- KESATU : Program dan kegiatan prioritas dan indikator kinerja yang disertai target dan kebutuhan pendanaan yang telah diselaraskan dengan usulan kegiatan prioritas dari Musrenbang RKPD di Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen;
- KEDUA : Menyepakati berita acara ini beserta lampirannya, merupakan satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari berita acara hasil kesepakatan Musrenbang RKPD di Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen;
- KETIGA : Berita acara ini beserta lampirannya dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan Renja Kecamatan Petanahan Kabupaten Kebumen Tahun 2025.

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Petanahan, 22 November 2023



Kepala Sidang
Kecamatan Petanahan

EDY PURWOKO, M.Si
1660515 198607 1 002

Menyetujui,
Wakil Peserta Musrenbang RKPD di Kecamatan Petanahan
Kabupaten Kebumen

NO	NAMA	UNSUR PERWAKILAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1.		DPRD		
2.	Dwi Agus Cahyono	Unsur Perangkat Daerah		
3.	Drs. Edy Purwoko, M.Si	Unsur Kecamatan		
4.	Dra. Wiwik Widayati	Unsur Lembaga		
5.	Zen Kholik	Unsur Masyarakat/ LSM		

Daftar 10 Usulan Kegiatan Desa Berdasarkan Hasil MUSRENBANCCAM Tahun 2023 Untuk Usulan Tahun 2025

No	Usulan	Permasalahan	Alamat/Lokasi	Volume	Kecamatan	Desa/Kelurahan	SKPD Tujuan	Anggaran (Rp)	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pembangunan Jaringan Irigasi Desa/Normalisasi drainase	Pertanian	Drainase dan wungu ke salak di samping jalan	1 Paket	Petahanan	Karangduwur	DPUPR	200.000.000									
2	Terbangunnya Jalan Usaha Tani	Pembangunan Prasarana Pertanian	Jatimulyo Jatiasari	1 Paket	Petahanan	Jatimulyo	Distapang	200.000.000									
3	Pemeliharaan Jalan Secara Berkala	Penyenggaraan Jalan /Kampung Kota	Grujugan	1700 meter	Petahanan	Grujugan	DINAS PUPR	500.000.000									
4	Jumlah Panjang Jalan yang dilakukan pemeliharaan secara berkala	Penyenggaraan Jalan/Kampung kota	Dukuh Sentul RT 06 RW 03 Desa Nampudadi	0,300 KM	Petahanan	Nampudadi	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen	180.000.000									
5	Saluran drainase yang dipelihara / direhabilitasi / dibangun	Pengelolaan dan Drainase yang Terhubung	Desa	1 Paket	Petahanan	Jogomertan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	250.000.000									
6	Jaringan Irigasi Tersier BPUD	Pembangunan Jaringan Irigasi Tersier	Desa Kritig - Desa Podourip	600 meter	Petahanan	Kritig	DPUPR	200.000.000									
7	Talud Penahan Tebing	Pembangunan talud Penahan Tebing	RT 01 - 03 RW 01	350 m	Petahanan	Podourip	DPUPR	604.000.000									
8	Kegiatan DAPAT	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan	Gapoktan	1 paket	Petahanan	Tegairetno	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KEBUMEN	147.260.000									
9	Holmik Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Jalan Kabupaten/Kota	RW 03	250 meter	Petahanan	Mungu	PUPR	150.000.000									
10	Terbangunnya parapet (tanggul) sungai	Pengelolaan & Pengembangan Drainase	Dukuh Nungsa	700 meter	Petahanan	Kebonsari	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang	300.000.000									



KIP 19650515 198607 1002
Pembina Tingkat I
Disdikbud Purwokerto, M.S.

**DAFTAR PRIORITAS USULAN KECAMATAN
TAHUN 2023**

1. Pembangunan Kantor Kecamatan;
2. Rehab Pasar Petanahan;
3. Pembangunan Pasar Tanjungsari (Gamblok);
4. Pembangunan SMP Negeri 2 Petanahan di sebelah utara;
5. Pembangunan Drainase Japawira Jogomertan – Petanahan ;
6. Peningkatan/Pengerasan Jalan Petanahan – Jatimulyo (Jln Bulus PP);
7. Peningkatan/Pengerasan Jalan Dorowati – Kritig;
8. Pembangunan Lampu APIL Perempetan Munggu;
9. Pembangunan Lampu APIL Karanggadung;
10. Pembangunan Warning Lamp SMA Negeri 1 Petanahan.

MUSRENBANG RKPD DI AULA KEC PETANAHAN TANGGAL 22 NOVEMBER 2023

